E-ISSN: 2622-7045 | P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2
Received: 28 November 2023, **Revised:** 7 Desember 2023, **Publish:** 9 Desember 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Implementasi Prinsip Ultra Vires di Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia

Wirazilmustaan[1], Charles Simabura[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia
Email: wira.aan@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding Author: wira.aan@gmail.com

Abstract: *This research aims to compare the concept of ultra vires in company law in Indonesia, England, Germany, Singapore and Australia. Ultra vires refers to company actions that exceed the limits of authority established in the articles of association or memorandum of association. Each country has a different legal framework in dealing with ultra vires issues, and this article will analyze the differences and similarities in the legal approaches of these five countries.*

Keyword: *Company Law, Ultra Vires, Comparative.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep ultra vires dalam hukum perusahaan di Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia. Ultra vires mengacu pada tindakan perusahaan yang melewati batas wewenang yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar atau memorandum of association. Setiap negara memiliki kerangka hukum yang berbeda dalam mengatasi masalah ultra vires, dan tulisan ini akan menganalisis perbedaan dan persamaan dalam pendekatan hukum kelima negara tersebut.

Kata Kunci: Hukum Perusahaan, Ultra Vires, Perbandingan.

PENDAHULUAN

Dari beberapa keluarga hukum utama di dunia saat ini, yuridiksi romano-germanic dan yuridiksi common law lah yang memainkan peran dominan dalam perkembangan hukum perusahaan. Dalam bab ini berfokus pada hukum dagang Eropa (khususnya, Perancis, Jerman, dan Hukum Perusahaan ME) dan membandingkannya dengan hukum perusahaan Inggris, karena beberapa alasan berikut (Peter De Cruz, 2017), Pertama, di dalam wilayah Eropalah konsentrasi yang lebih besar dari sisem hukum yang dominan dapat ditemukan. Kedua, institusi-institusi yang ada di dalam Masyarakat Eropa telah membawa sebuah dimensi baru ke dalam bidang hukum perusahaan.

Dalam ranah hukum perusahaan, prinsip ultra vires memegang peran krusial dalam menentukan batasan wewenang suatu entitas perusahaan dan mencegah penyalahgunaan

kekuasaan. Prinsip ini merujuk pada keharusan suatu perusahaan untuk bertindak sesuai dengan wewenang yang telah diamanahkan kepadanya. Studi perbandingan tentang implementasi prinsip ultra vires pada negara-negara dengan sistem hukum Common Law dan Civil Law, seperti Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia, memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana prinsip ini diadaptasi dan diterapkan dalam konteks hukum perusahaan.

Negara-negara dengan sistem hukum Common Law, seperti Inggris dan Australia, memandang prinsip ultra vires sebagai landasan penting dalam membentuk dan mengatur perilaku perusahaan. Penerapan prinsip ini sering kali melibatkan proses hukum yang mengacu pada preseden atau keputusan pengadilan sebelumnya. Pengadilan memiliki peran sentral dalam menetapkan dan menjaga batasan wewenang perusahaan, sehingga mendorong kepatuhan terhadap hukum dan keadilan dalam dunia bisnis.

Di sisi lain, negara-negara dengan sistem hukum Civil Law, termasuk Indonesia, memiliki pendekatan yang berbeda terhadap prinsip ultra vires. Dalam konteks ini, kepatuhan perusahaan terhadap batasan wewenangnya lebih diatur oleh perundang-undangan yang terinci dan kode hukum. Pengawasan dilakukan melalui badan administratif dan pengadilan administratif yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tindakan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pentingnya pemahaman mendalam tentang perbedaan implementasi prinsip ultra vires di antara Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia terkait hukum perusahaan tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga kontribusi praktis bagi dunia bisnis internasional. Dalam era globalisasi ini, perusahaan sering beroperasi di lintas batas negara, dan pemahaman mendalam terhadap prinsip ini dapat memberikan landasan hukum yang kokoh bagi keberlanjutan dan keberhasilan bisnis.

Studi perbandingan ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan dan persamaan dalam penerapan prinsip ultra vires di konteks hukum perusahaan di Indonesia, Inggris, Jerman, Sngapura, dan Australia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan peraturan dan praktik hukum perusahaan di Indonesia, sejalan dengan standar internasional, serta meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan terkait kepatuhan perusahaan terhadap prinsip ultra vires. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan holistik bagi para praktisi hukum perusahaan dan pembuat kebijakan untuk memajukan ketahanan dan integritas perusahaan dalam lingkungan hukum yang terus berubah dan kompleks.

METODE

Penulis dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (*doctrinal legal research atau pure legal research*) yaitu penelitian hukum yang bersandar pada bahan pustaka atau data sekuncder yaitu dengan pendekatan perundang-undangan. Objek dalam tulisan ini yaitu pengaturan hukum perusahaan pada Negara-negara *common law dan civil law*: tinjauan umum komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ultra Virus dalam Konteks Hukum Perusahaan

Istilah ultravirus terdiri dari dua kata latin Ultra dan virus. Ultra artinya Melampaui dan virus artinya kekuatan dengan demikian ultravirus berarti melakukan suatu perbuatan di luar kekuasaan. Suatu perusahaan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan atau membuat kontrak yang diperbolehkan baik secara tegas maupun tersirat oleh akta pendiriannya. Perusahaan tidak dapat melampaui objek atau ruang lingkup nota asosiasi suatu kontrak yang bersifat ultravirus, perusahaan yang berada di luar kekuasaan perusahaan adalah batal demi hokum dan tidak mengikat perusahaan.

Menilik dari segi sejarah doktrin tradisional ultra vires membatasi kapasitas kontrak dan kewenangan korporasi pada tujuan dan aktivitas yang secara tegas dijabarkan dalam piagam atau konstitusi korporasi.[1] . Gerbong Kereta Api Ashbury dan Iron Company Limited versus Richie pada tahun 1875. Doktrin ultravirus pertama kali muncul dinyatakan oleh House of Lords di Perusahaan Kereta Api dan Besi Ashbury Limited versus Richie.[2] Memorandum Asosiasi sebuah perusahaan mendefinisikan objeknya sebagai membuat dan menjual atau mendarat di gerbong dan gerbong Kereta Api yang lebih tinggi dan untuk menjalankan usaha insinyur mesin dan kontraktor umum, ini adalah objek perusahaan yang tertulis dalam objek Klausul memorandum perusahaan mengadakan kontrak dengan kontraktor Kereta Api bentuk lain untuk membiayai pembangunan jalur Kereta Api di Belgia nantinya.

Doktrin ultra vires mempengaruhi kontrak melalui dua cara utama. Pertama, hal ini memungkinkan pengadilan untuk mengontrol tujuan badan publik menggunakan kewenangan kontraknya. Kedua, melalui aturan bahwa badan publik tidak boleh membatasi diskresinya, ultra vires memungkinkan pengadilan untuk memastikan bahwa kontrak tidak menjadi kendala yang tidak semestinya terhadap kinerja badan publik dalam menjalankan tugasnya. Kedua aspek doktrin ini mempunyai potensi untuk bertindak sebagai perlindungan penting terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam kontrak.[3]

Implementasi Prinsip Ultra Vires berdasarkan Sistem Hukum Common Law dan Civil Law antara Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australian

Ultra vires adalah konsep yang muncul dalam hukum perusahaan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan mencegah perusahaan dari melakukan tindakan yang melewati batas wewenang yang telah ditetapkan. Meskipun konsep ini diterima secara umum, implementasinya dapat berbeda antara negara-negara. Dalam jurnal ini, kami akan membandingkan tiga yurisdiksi hukum yang berbeda: Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia.

Ultra Vires di Indonesia

Di Indonesia, ultra vires diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Menurut UU PT, perusahaan harus menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan yang diatur dalam akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Tindakan yang melewati batas ini dapat dibatalkan oleh pengadilan sesuai dengan Pasal 72 UU PT. Namun, perubahan hukum perusahaan di Indonesia telah mengurangi kepentingan ultra vires, dengan mengizinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan klasifikasi umumnya.

Ultra Vires di Australia

Di Australia, ultra vires telah diatasi melalui pendekatan yang lebih liberal. Undang-Undang Perusahaan Australia 2001 memberikan perusahaan otoritas lebih besar untuk menjalankan kegiatan yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam memorandum of association mereka. Lebih lanjut Sebagian besar kasus berkisar pada isu apakah pembatasan kemampuan pemegang saham dalam menangani aset perusahaan telah dihapuskan berdasarkan penerapan pasal 67 dan 68 Kode Perusahaan, yang telah menghapuskan doktrin ultra vires. Australia. Pengadilan menyetujui bahwa ultra vires, dalam artian membatasi

[1] Jacks Anderson, The evolution of the ultra vires rule in Irish company law, Iristh Jurist, Vol. 38, 2003, p.263-284,

[2] Jean Warbuton, Charitable companies and the ultra vires rule, Conveyancer and Property Lawyer, Conveyancer and Property Lawyer, Conveyancer and Property Lawyer, 1988, p. 275-283

[3] Sweet&Maxwell, Ultra vires problems in government contracts, Law Quarterly Review, Vol. 122, 2006, p.98-123

kapasitas perusahaan, telah dihapuskan. Misalnya dalam kasus ANZ Executors & Trustees Co Ltd v Qintex Australia Ltd yang merupakan ultra vires dalam arti luas dan menyangkut penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi atau pemegang saham. Dalam keadaan seperti ini, ultra vires hanya dihapuskan dalam penerapannya terhadap keabsahan hubungan perusahaan dengan pihak luar dan tidak membebaskan pemegang saham atau direktur untuk memastikan bahwa peraturan perusahaan diterapkan.[4]

Ini berarti bahwa perusahaan di Australia memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan bisnis mereka tanpa harus mematuhi batasan yang ketat.

Ultra Vires di Inggris

Di Inggris, ultra vires telah mengalami perkembangan yang signifikan. Kasus Ashbury Railway Carriage and Iron Co. Ltd v. Riche (1875) menjadi preseden penting yang mengizinkan pengadilan untuk membatalkan tindakan yang melewati batas wewenang. Namun, dalam kasus-fasus berikutnya, seperti Salomon v. Salomon & Co. Ltd (1897), pengadilan cenderung memberikan perlindungan yang lebih besar kepada perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Ini telah menghasilkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap ultra vires di Inggris. [5]

Dinamika penerapan doktrin Ultra Vires di Inggris berdasarkan hukum yang tidak tertulis dan kebiasaan, terpengaruh oleh wacana penerapan doktrin ultra vires dalam kasus yang muncul dimasyarakat. Aturan-aturan yang tidak tertulis cenderung menjadi aturan tertulis sampai memengaruhi wilayah hukum administrasi sehingga David Jenkins menegaskan bahwa "…ultra vires doctrine has become a fundamental part of british contitutional practice"[6]

Diundangkannya European Communities Act 1972, seiring dengan upaya harmonisasi peraturan hukum di Eropa, di Inggris ada upaya untuk mempersempit pemberlakuan doktrin ultra vires, karena keluhan berbagai pihak yang menganggap pemberlakuan doktrin ultra vires secara ketat dan kaku dalam bisnis akan membawa dampak yang merugikan. Reformasi untuk mengakhiri penerapan doktrin ultra vires dalam rangka menghadapi globalisasi perdagangan dunia telah diupayakan oleh Departement of Trade and Industry, namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil dengan diundangkannya Companies Act 1989 yang masih memberikan indikasi dimungkinkannya penerapan doktrin ultra vires.[7]

Barulah dalam Companies Act 2006 pendaftaran pendirian perusahaan tidak wajib lagi mencantumkan tujuan perusahaan seperti dapat dibaca dalam pasal 31(1): "Unless a companys articles specifically restrict the objects of the company, its object are unrestricted". Juga dalam Pasal 41 (1) diatur: "In favour a person dealing with a company in good faith, the power of the directors to bind the com- pany, or authorized to do so, is deem to be free of any limitations under the company's constitution". Sehubungan dengan diundang- kannya The Companies Acts 2006 tersebut, Gregory Mitchell dan Richard Brent menegaskan bahwa: "The Companies Act 2006 makes it difficult for and English registered company to seek to rely upon the strict English law ultra vires doctrine".[8] Dengan demikian perkembangan terbaru di Inggris membatasi secara sangat ketat penerapan doktrin ultra vires tersebut.

[4] JG, Australia: company law: ultra vires, Journal of International Banking Law, Vol. 6 No. 3, 1991, p. 45-46
[5] Lurline Stanford, Caribbean: the ultra vires doctrine in perspective, Comp. Law, Vol. 7 No. 3, 1986, p. 121-124
[6] David Jenkins, From Unwritten: Transformation in the british common-law constitution, Vanderbilt Journal of Traditional Law, Vol. 36 No 863, p.894, 2003.
[7] Paul J. Omar, Power, "Purposes and Objects: The Protracted Demise of the Ultra Vires Rule", Bond Law Review Vol 16, No 1, p. 110, Tahun 2004.
[8] Gregory Mitchell and Richard Brent, "English Law Contracts, Foreign Counterparties and Ultra Vires", Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, p. 463, 2010.

Ultra Vires di Jerman

Belakangan ini banyak negara mulai membatasi penerapan doktrin ultra vires. Namun, di Jerman Penerapan Ultra Vires dianggap lebih longgar dalam Germanic Basic Law berhadapan dengan aturan dalam European Law yang harus ditegakkan oleh European Court of Justice terhadap pembatasan doktrin ultra vires yang semakin ketat.[9]

Ultra Vires di Singapura

Terdapat dua pengujian yang berbeda untuk tindakan “ultra vires” di Singapura (satu untuk perusahaan berdasarkan ss25 dan satu lagi untuk perusahaan berdasarkan Hukum Inggris) dan hal ini tentunya tidak diinginkan.[10] Namun berdasarkan logika saja, jawabannya adalah tes di RSP lebih logis. Pengadilan Banding Inggris telah dengan jelas mendefinisikan perbedaan antara kelebihan wewenang agen dan kurangnya kapasitas perusahaan. Pembacaan yang cermat terhadap ss25 dan 20 menunjukkan bahwa keduanya tidak memvalidasi perbuatan “ultra vires”, namun hanya mencegah agar perbuatan tersebut tidak sah sebagai akibat dari “ultra vires”. (d) perusahaan tidak kehilangan kapasitas atau kekuasaan untuk mengadakan kontrak-kontrak tersebut berdasarkan memorandum dan anggaran dasarnya. (c) pihak ketiga dibujuk oleh perwakilan tersebut untuk mengadakan kontrak dengan perusahaan; Dan Menerapkan prinsip ini di RSP sebenarnya akan mengurangi perlindungan yang ditawarkan oleh ss25 dan 20. faktanya diketahui pihak ketiga. Pihak ketiga tidak akan mampu membuktikan otoritas yang nyata karena ia mengetahui bahwa representasi otoritas itu salah dan ia akan kesulitan membuktikan bahwa ia mengandalkan representasi yang ia tahu salah. Penggunaan istilah “pemberitahuan konstruktif' oleh Slade LJ dalam RSP agak membingungkan dalam konteks lokal. Namun demikian, mengingat s25 SCA dan s20 MCA, akan lebih baik jika poin ini dianggap tidak dapat diterapkan karena hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh agen perusahaan dapat dibatalkan berdasarkan prinsip keagenan, sehingga membatalkan ss25 SCA dan 20 MCA, dan membatasi penerapannya pada kasus-kasus di mana pihak ketiga tidak mengajukan pertanyaan sama sekali dan berperilaku seperti tiga pepatah tersebut ”Bona fides' terhadap pihak ketiga Hal ini merupakan perbedaan yang penting, karena hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa keabsahan tindakan tersebut dibiarkan terbuka untuk diserang dengan alasan lain. Sekalipun digunakan pengertian disjungtif “atau', tindakan “ultra vires” dapat dipertanyakan jika pihak ketiga mengetahui kurangnya kekuasaan agen. Di sisi lain, tidak adanya pemberitahuan dari pihak ketiga berarti bahwa tindakan tersebut masih sah, terlepas dari apakah arti kata penghubung atau disjungtif “atau' digunakan.

KESIMPULAN

Perbandingan ultra vires di Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia.menunjukkan perbedaan dalam pendekatan hukum yang mendasar. Indonesia cenderung memiliki pendekatan yang lebih ketat terhadap ultra vires, sementara Australia memiliki pendekatan yang lebih liberal, dan Inggris menggabungkan elemen-elemen dari keduanya. Sedangkan untuk Jerman dan Singapura Berbeda dengan Inggris. Perubahan dalam hukum perusahaan dari waktu ke waktu juga memengaruhi cara ketiga negara ini mengatasi ultra vires. Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, pemahaman tentang perbedaan ini penting bagi pelaku bisnis yang beroperasi di ketiga negara ini.

[9] Mattias Mahlmann, The Politics of Constitutional Identity and Its Legal Frame-the Ultra Vires Decision of the German Federal Contitution, German Law Journal, Vol. 11 No. 12, p.1410-1411, 2010.

[10] Boo King Ong, Ultra vires in Singapore and Malaysia, a brief appraisal, Comp. Law, Vol. 9 No.2, 1988, p.65-67

REFERENSI

David Jenkins, From Unwritten: Transformation in the british common-law constitution, Vanderbilt Journal of Traditional Law, Vol. 36 No 863, p.894, 2003.

Gregory Mitchell and Richard Brent, "English Law Contracts, Foreign Counterparties and Ultra Vires", Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, p. 463, 2010

Jacks Anderson, The evolution of the ultra vires rule in Irish company law, *Irish Jurist*, Vol. 38, p.263-284, 2003

JG, Australia: company law: ultra vires, Journal of International Banking Law, Vol. 6 No. 3, p. 45-46, 1991

Jean Warburton, "Charitable Companies and the Ultra Vires Rule", Conveyancer and Property Lawyer 275 at 282–283, 1988

Lurline Stanford, Caribbean: the ultra vires doctrine in perspective, Comp. Law, Vol. 7 No. 3, p. 121-124, 1986

Mattias Mahlmann, The Politics of Constitutional Identity and Its Legal Frame-the Ultra Vires Decision of the German Federal Contitution, German Law Journal, Vol. 11 No. 12, p.1410-1411, 2010

Paul J. Omar, Power, "Purposes and Objects: The Protracted Demise of the Ultra Vires Rule", Bond Law Review Vol 16, No 1, p. 110, 2004

Sweet&Maxwell, Ultra vires problems in government contracts, Law Quarterly Review, Vol. 122, p.98-123, 2006